



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRAH NUR
2. Jabatan : DIREKTUR RUMAH UMUM DAN KOMERSIAL
3. NHK : 818501

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.934.713.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m ² /36 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m ² /70 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 600.000.000		
3. Bangunan Seluas 30 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000		
4. Bangunan Seluas 29.25 m ² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 158.400.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m ² /85 m ² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , HADIAH , Rp. 997.313.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	403.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
2. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 Tahun 2017, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 400.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.045.478.099
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.383.191.099



III. HUTANG

Rp. 258.997.656

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.124.193.443

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.